PENGARUH JUMLAH PENDUDUK TINGKAT PENGANGGURAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN (STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TIMUR)

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Jurusan Ekonomi Pembangunan



Oleh:

TEGAR RIZKI AKBAR 0911010004/FEB/EP

Kepada

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

2013

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK TINGKAT PENGANGGURAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN (STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TIMUR)

Yang diajukan

TEGAR RIZKI AKBAR 0911010004/FEB/EP

Telah Disetujui untuk Untuk diseminarkan oleh :

Mengetahui,

Ketua Progdi Ekonomi Pembangunan

DRA. EC. NINIEK IMANINGSIH, MP

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK TINGKAT PENGANGGURAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN (STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TIMUR)

Yang diajukan

TEGAR RIZKI AKBAR 0911010004/FEB/EP

Telah diseminarkan dan disetujui untuk menyusun skripsi oleh :

 Pembimbing Utama

 DRS. EC. SUWARNO, ME
 Tanggal:.....

 NIP. 196302201985031001

Mengetahui,

Ketua Progdi Ekonomi Pembangunan

DRA. EC. NINIEK IMANINGSIH, MP

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK TINGKAT PENGANGGURAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN (STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TIMUR)

Yang diajukan

TEGAR RIZKI AKBAR 0911010004/FEB/EP

Telah disetujui untuk ujian skripsi oleh:

Mengetahui,

A/N Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Wakil Dekan I

DRS. EC. Rachman Suwaidi, MS

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK TINGKAT PENGANGGURAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN (STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TIMUR)

Yang diajukan

TEGAR RIZKI AKBAR 0911010004/FEB/EP

Disetujui untuk Ujian Skripsi oleh:

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis

DR. DHANI ICHSANUDDIN NUR, MM

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK TINGKAT PENGANGGURAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN (STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TIMUR)

Diajukan oleh

TEGAR RIZKI AKBAR 0911010004/FEB/EP

Telah dipertahankan dihadapan Dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada Tanggal 27 September 2013

Pembimbing Utama

Tim Penguji Ketua

<u>Drs. Ec. Suwarno, ME</u> NIP. 195908281990031001 <u>Drs. M. Taufiq, MM</u> NIP.

Sekretaris

Ir. Hamidah Hendrarini. Msi NIP

Anggota

<u>Drs. Ec. Suwarno, ME</u> NIP. 195908281990031001

Mengetahui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional ""Veteran" Jawa Timur

> <u>Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, SE, MM</u> NIP. 196309241989031001

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur saya panjatkan puji kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan sehingga peniliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu kewajiban mahasiswa untuk memenuhi tugas dan syarat akhir akademis di Perguruan Tinggi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Fakultas Ekonomi Dan Bisnis khususnya Jurusan Ekonomi Pembangunan. Dalam Penulisan Skripsi ini "Pengaruh Peneliti mengambil iudul Jumlah Penduduk Timgkat Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Timur)". Peneliti Menyadari sepenuhnya bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang ada. Walaupun demikian berkat bantuan dan bimbingan yang di terima dari bapak Drs.Ec.Suwarno,ME. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah mengarahkan dari awal untuk memberikan bimbingan kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik.

Atas terselesaikannya skripsi ini, peneliti menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Socdarto, MP, selaku Rektor Universitas
 Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang telah banyak

i

- memberikan banyak bantuan berupa saran fasilitas dan perijinan guna pelaksanaan skripsi ini.
- Bapak Dr. H. Dhani Ichsannudin Nur, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Ibu Dra. Ec. Niniek Imaningsih, MP, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- 4. Bapak Bapak dan Ibu ibu dosen beserta staf karyawan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang telah banyak memberikan banyak ilmu, pengalaman serta fasilitas selama masa perkuliahan dan pelayanan akademik maupun non akademik bagi peneliti.
- 5. Bapak Bapak dan Ibu Ibu instansi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, dan beberapa perpustakaan Universitas – Universitas Negeri di Surabaya, yang telah memberikan banyak informasi dan data – data yang dibutuhkan untuk mengadakan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
- 6. Ayah, Ibu, dan Adik Adik beserta keluarga tercinta yang telah memberikan motivasi, doa, semangat dan dorongan moral materil serta spiritualnya yang tulus kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik baiknya.

7. Seluruh Anggota Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi Studi

Pembangunan angkatan 2009 hingga 2013 Universitas

Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Serta semua pihak

Organisasi Mahasiswa lainnya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu

persatu yang selalu memotivasi, membantu dan mendukung peneliti

dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT berkenan dan memberikan balasan, limpahan rahmat,

serta karunia-Nya, atas segala amal kebaikan serta bantuan yang telah diberikan.

Akhir kata. Besar harapan bagi peneliti semoga skripsi ini dapat bermafaat

bagi pembaca, baik sebagai bahan kajian maupun sebagai salah satu sumber

informasi dan bagi pihak – pihak lain yang membutuhkan.

Wassalammu' alaikum Wr. Wb.

Surabaya, September 2013

Penulis

iii

DAFTAR ISI

	На	lamar
KATA P	ENGANTAR	. i
DAFTAF	R ISI	iv
DAFTAF	R TABEL	vii
DAFTAF	R GAMBAR	viii
DAFTAF	R LAMPIRAN	ix
ABSTRA	AK	X
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Perumusan Masalah	12
	1.3 Tujuan Penelitian	12
	1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	14
	2.1 Penelitian Terdahulu	14
	2.2 Landasan Teori	18
	2.2.1 Pengertian Kemiskinan	18

	2.2.1.1 Teori Kemiskinan	21
	2.2.1.2 Beberapa Dampak Kemiskinan	23
	2.2.2 Pengertian Pengangguran	24
	2.2.2.1 Jenis – Jenis Pengangguran	25
	2.2.2.2 Teori Pengangguran	26
	2.2.3 Pengertian Jumlah Penduduk	28
	2.2.3.1 Teori Jumlah Penduduk	28
	2.2.3.2 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Kemiskinan	30
	2.2.4 Pengertian Tingkat Pendidikan	31
	2.2.4.1 Teori Tingkat Pendidikan	32
	2.2.4.2 Unsur – Unsur Pendidikan	33
	2.2.4.3 Tujuan Pendidikan	34
	2.2.4.4 Jalur Pendidikan	34
	2.3 Kerangka Pikir	34
	2.4 Hipotesis	38
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	39
	3.1 Bentuk Penelitian	39

	3.2 Definisi Operasional	40
	3.3 Teknik Analisis	42
	3.4 Uji Hipotesis	42
	3.5 Pendekatan Regresi Linier Berganda Dengan Asumsi BLUE	47
	3.6 Teknik Pengumpulan Data	52
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
	4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	53
	4.2 Deskripsi Hasil penelitian	54
	4.3 Hasil Analisis Asumsi Regresi Klasik	58
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	72
	5.1 Kesimpulan	72
	5.2 Saran	73
DAFTAF	R PUSTAKA	

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	: Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2004 hingga 2011.	1
Tabel 2	: Auto Korelasi Durbin Watson	5(
Tabel 3	: Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2004 hingga 2011	. 55
Tabel 4	: Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2004 hingga 2011	56
Tabel 5	: Perkembangan Tingkat Pengangguran Tahun 2004 hingga 2011	. 57
Tabel 6	: Perkembangan Tingkat Pendidikan Tahun 2004 hingga 2011	57
Tabel 7	: Test Multikolinier	60
Tabel 8	: Test Heterokedastisitas	61
Tabel 9	: Analisis Varian (ANOVA)	63
Tabel 10	: Hasil Analisis Secara Parsial	66

DAFTAR GAMBAR

	Halamar
Gambar 1 : Kerangka Pikir Kemiskinan	7
Gambar 2 : Kurva Distribusi F	45
Gambar 3 : Kurva Distribusi t	47
Gambar 4 : Kurva Durbin Watson	49
Gambar 5 : Kurva Statistik Durbin Watson	59
Gambar 6: Distribusi Kriteria Penolakan	64
Gambar 7 : Kurva Distribusi Hasil Faktor Jumlah Penduduk	
Tehadap Kemiskinan	66
Gambar 8 : Kurva Distribusi Hasil Faktor Tingkat Pengangguran	
Tehadap Kemiskinan	68
Gambar 9: Kurva Distribusi Hasil Faktor Tingkat Pendidikan	
Tehadap Kemiskinan	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Input Dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Lampiran 2: Regresion

Lampiran 3 : Hasil Coefficient

Lampiran 4: Nonparametric Correlations

Lampiran 5: Tabel Pengujian F

Lampiran 6: Tabel Pengujian t

Lampiran 7: Tabel Pengujian Durbin Watson

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK TINGKAT PENGANGGURAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN (STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TIMUR)

Oleh:

Tegar Rizki Akbar

ABSTRAKSI

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang sangat mempengaruhi tingkat kesjahteraan bukan karena adanya pengangguran saja tetapi juga bisa di lihat dari sisi banyaknya jumlah penduduk atau bisa dikatakan suatu kuantitas tidak mengimbangi kualitas. Untuk mengetahui pengaruh Simultan maupun persial faktor jumlah penduduk, tingkat pengangguran meningkat dan tingkat pendidikan akhir masyarakat terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan dari jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur tahun 2004 - 2011. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kuantitatif perhitungan, berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Analisis regresi linier berganda merupakan suatu metode yang digunakan dalam menganalisis hubungan yang mempunyai pengaruh antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas.

Dengan melihat hasil perhitungan metode regresi linier berganda peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa selama hasil pengujjian hipotesis menyatakan bahwa tingkat Jumlah Penduduk (X1), Tingkat Pengangguran (X2), Dan Tingkat Pendidikan (X3), mempunyai pengaruh secara simultan, tetapi hamya timgkat pengangguran (X2) yang berpengaruh secara langsung atai secara singnifikan positif terhadap Kemiskinan di Jawa Timur (Y) terbukti kebenarannya karena keempat variabel tersebut mampu menjelaskan variabel dependen.

Kata kunci : Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran, Dan Tingkat Pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fenomena sosial, tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Fenomena ini telah menjadi perhatian global pada konferensi tingkat tinggi dunia yang berhasil menggelar deklarasi dan program aksi untuk pembangunan sosial di Copenhagen pada tahun 1995. Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan orang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan standar kebutuhan yang lain (Herbert, 2001).

Misalnya, jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses kepelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Adapun penyebab kemiskinan dapat dikelompokkan atas dua hal yaitu (1) faktor alamiah: kondisi lingkungan yang miskin, ilmu pengetahuan yang tidak memadai, adanya bencana alam dan lain-lain, (2) faktor nonalamiah: akibat kesalahan kebijakan ekonomi, korupsi, kondisi politik yang tidak stabil, kesalahan pengelolaan sumber daya alam. Masalahmasalah yang timbul akibat kemiskinan tersebut antara lain: gizi buruk, busung lapar, penyakit menular, dan kasus kriminalitas (Lubis, 2006)

Sekali pun kondisi makro perekonomian dilaporkan mulai membaik, tetapi akibat lesunya pertumbuhan sektor riil, maka yang terjadi kemudian selain jumlah penduduk miskin tetap tinggi, yang tak kalah mencemaskan adalah terus meningkatnya angka pengangguran. Di Provinsi Jawa Timur, rata-rata per tahun diperkirakan ada penambahan sekitar 600 ribu angkatan kerja baru, dan ironisnya hanya sekitar 20-30 persen yang dapat terserap di sektor formal. Sekitar 70-80 persen sisanya terpaksa bekerja di sektor informal atau bahkan sama sekali tidak bekerja (Kompas, 17 September 2003). Menurut catatan Disnaker (2006), di Provinsi Jawa Timur jumlah angkatan kerja sebanyak 19.400.245 jiwa, sementara kesempatan kerja yang tersedia hanya 17.509.103 jiwa, sehingga sampai dengan Januari 2006 jumlah pengangguran tercatat sebesar 11.891.142 jiwa. Jumlah penurunan kemiskinan Jatim juga paling tinggi di Indonesia. Mencapai 3,28 persen sejak Maret 2009 hingga Maret 2012, atau 6.022.590 orang miskin menjadi 5.070.980 orang miskin. Dengan tingginya jumlah penurunan orang miskin ini tak heran jika pada Maret 2011-Maret 2012 jumlah orang miskin mencapai 285.230 orang dan menobatkan Jatim menjadi provinsi yang mampu memberikan kontribusi 32,174 persen dalam penurunan kemiskinan di Indonesia. Begitu pula dengan penurunan jumlah pengangguran. Tren tingkat pengangguran terbuka di Jatim dari tahun ketahun selalu mengalami penurunan. Pada Februari 2009 jumlah orang menganggur mencapai 5,87 persen, Februari 2010 sebesar 4,91 persen, Februari 2011 sebanyak 4,18 dam Februari 2012 menjadi 4,14 persen atau effort selama tiga tahun mencapai 1,73 persen. Banyaknya jumlah penurunan pengangguran ini tak bisa dilepaskan dari tingginya investasi di

Jawa Timur. Berdasarkan data dari Sekdaprov Jatim, sampai dengan triwulan III 2012, jumlah proyek baru yang masuk ke Jatim mencapai 275 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp36,71 triliun. Dengan banyaknya investasi ini, mampu menyerap sebanyak 46.673 tenaga kerja baru. Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menuturkan, Pemprov Jatim memiliki banyak program atau strategi untuk penanggulangan kemiskinan di Jatim. Di antaranya adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui Jalinkesra (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat), BOS/BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah), Jamkesmas (Jaminan Kesejahteraan Masyarakat), Ponkesdes, bedah RTLH (rumah tidak layak huni) hingga kepastian pelayanan publik. Selain itu, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dengan bantuan permodalan dan pelatihan ketrampilan. Kemudian mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil seperti membantu pemasaran dan chanelling. "Kita juga melakkan penguatan kelembagaan masyarakat desa melalui pelatihan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan pelatihan UPK (Unit Pengelola Kegiatan)," jelas Gubernur Soekarwo. Dari sekian banyak strategi yang diluncurkan Gubernur Soekarwo dan Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf, program Jalinkesra yang paling menjadi andalan. Titik nol kinerja pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Jatim tahun 2009, menunjukkan data penduduk miskin Jatim sebesar 6.022.590 jiwa (16,68) dan data PPLS (Program Perlindungan Layanan Sosial) tahun 2008, jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebesar 3.079.822 Rumah Tangga Miskin (RTM) by name by address terbagi ke dalam strata sangat miskin, sebanyak 493.004 (16 persen); miskin,

1.256.122 (41 persen); dan hampir miskin, 1.330.696 (43 persen). Kelompok rumah tangga strata sangat miskin ini relatif belum pernah menjadi target spesifik prioritas berbagai penanggulangan kemiskinan secara eksklusif. Mereka lebih sering diposisikan sebagai kelompok sasaran yang diikutsertakan dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan tanpa mempertimbangkan dan membedakan strata kemiskinan pada masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan selama ini mengalami kendala membidik strata sangat miskin secara spesifik dan tepat sasaran, karena ketiadaan basis data mengenai keberadaan mereka (by name and address). Akibatnya, kemiskinan sering diperlakukan sebagai bersifat homogen, padahal kebutuhan rumah tangga strata sangat miskin agar dapat menapaki anak tangga demi anak tangga, keluar dari kemiskinan relatif berbeda dengan strata miskin, apalagi strata hampir miskin. Program yang dimulai sejak 2010 ini, total sebanyak 257.869 RTSM yang telah menerima bantuan program Jalinkesra. Dari jumlah itu, masyarakat yang paling banyak menerima bantuan adalah jenis peternakan yang mencapai 125.880 RTSM. Dengan rincian 2010 sebanyak 32.366 RTSM, 2011 sebanyak 45.241 RTSM dan 2012 48.273 RTSM. "Bantuan peternakan ini diberikan kepada RTSM by name, by address, by picture. Data lengkapnya ada di Bapemas Jatim. Bentuk bantuan bantuan peternakan seperti ayam, kambing, lebah madu atau peternakan lainnya," ujar Sekdaprov Jatim Dr H Rasiyo MSi. Selain peternakan yang dikoordinastori Dinas Peternakan Jatim, juga ada berbagai jenis bantuan Jalinkesra lain yang dikoordinir beberapa SKPD-SKPD di lingkungan Pemprov Jatim. Seperti bantuan Jalinkesra dari Dinas Pertanian Jatim yang telah memberikan bantuan kepada

RTSM sebanyak 74.160 orang, Disperindag Jatim 20.627 RTSM, Dinas Koperasi dan UMKM Jatim 7.846 Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim 13.697 RTSM, Dinas Perkebunan 147 RTSM dan Biro Kesra 12.512 RTSM. (Bapeda Jawa Timur, 2012)

Di Provinsi Jawa Timur, kemiskinan, pengangguran dan kesempatan kerja sesungguhnya adalah tiga masalah utama yang saling tali-temali dan tidak mustahil menjadi "bom waktu" yang merisaukan jika tidak segera ditangani dengan baik. Sekali pun mungkin Provinsi Jawa Timur berhasil menghela laju pembangunan dan mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, hal itu tidaklah otomatis dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Bahkan, bisa saja yang terjadi kemudian adalah mishmatch antara kesempatan kerja yang tersedia dengan kondisi basis sosial masyarakat dan terjadinya disparitas antar wilayah yang ujung-ujungnya melahirkan persoalan "urbanisasi berlebih" (Bagus, 2012:4)

Studi yang dilakukan Lembaga Penelitian Universitas Airlangga bekerjasama dengan Bapeprop Jatim (2011) menemukan, selain tekanan krisis dan kemiskinan, faktor yang menyebabkan persoalan pengangguran makin mencemaskan adalah adanya disparitas antara wilayah kabupaten-kota tertentu dengan kota-kota besar di Provinsi Jawa Timur, terutama Surabaya dan Malang. Di wilayah kabupaten yang miskin dan banyak kehilangan kesempatan kerja, jumlah pengangguran dapat dipastikan meningkat dan ketika di pedesaan tidak lagi bisa ditemukan tempat bergantung yang sesuai, maka pilihan yang terpaksa dilakukan adalah mengadu nasib ke kota besar dan bahkan ke luar negeri. Bagi keluarga-keluarga miskin di pedesaan,

situasi perekonomian yang tak kunjung membaik, bukan saja menyebabkan mereka rentan terkena PHK, tetapi juga kehilangan usahanya karena pangsa pasar yang makin menurun dan kenaikan biaya produksi yang tidak lagi menguntungkan. Tidak sedikit masyarakat miskin yang kehilangan sumber penghasilan bukan cuma satu-dua kali, tetapi berkali-kali. Di pedesaan, sektor pertanian yang selama ini sangat lentur dan memiliki mekanisme involutif yang tinggi, pelan-pelan mulai mendekati titik jenuh, sehingga alternatif yang mesti dipilih masyarakat miskin yang ter-PHK dan kehilangan pekerjaan adalah melakukan deversifikasi usaha, melakukan migrasi mengadu nasib di kota besar atau bahkan mengadu nasib ke negeri jiran sebagai TKI/TKW (meski jumlahnya tidak terlalu banyak). Bagi penduduk miskin yang mencoba tetap bertahan dalam kehidupan di pedesaan, maka pilihan pekerjaan yang ditekuni seringkali tidak berubah dari pola lama mereka, yakni di sektor pertanian dan sektor informal desa. Dari segi kesejahteraan, besar penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan yang saat ini mereka ditekuni dibandingkan dengan masa sebelum krisis, rata-rata tidak jauh berbeda, bahkan acapkali lebih kecil. Dengan latar belakang tingkat pendidikan yang relatif rendah, tidak memiliki keahlian khusus dan tidak pula memiliki aset produksi yang cukup, maka kemungkinan masyarakat miskin dapat terserap di sektor pekerjaan atau industri formal umumnya rendah. Kalau pun mereka dapat diterima di sektor industri formal di wilayahnya atau di kota besar lain, biasanya posisi yang dimasuki adalah pekerjaan-pekerjaan yang tergolong kasar yang lebih banyak mengandalkan otot daripada ijazah kesarjanaan dan profesionalisme. Untuk menangani persoalan pengangguran dan membangun kesempatan kerja yang dapat menyerap jumlah korban PHK dan pengangguran berskala massal, harus diakui bukanlah hal yang mudah. Akibat situasi keamanan yang relatif rapuh, minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Timur relarif menurun, bahkan sebagian malah ditandai dengan hengkangnya beberapa perusahaan besar asing. Ke depan, apakah Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan berhasil mengenjot arus investasi sebetulnya masih menjadi tanda-tanya besar. Tetapi, untuk jangka pendek, satu langkah realistis yang perlu dilakukan Jawa Timur dalam upaya penanganan persoalan pengangguran dan penciptaan kesempatan kerja adalah bagaimana mengkemas upaya yang dilakukan dalam satu paket dengan program untuk mengeliminasi disparitas atau kesenjangan antar wilayah. Pengalaman selama ini telah membuktikan bahwa makin berkurangnya kesempatan kerja di pedesaan dan "urbanisasi berlebih" (over urbanizations) sesungguhnya adalah konsekuensi dari terjadinya kesenjangan antar wilayah yang terlalu menyolok. Hubungan yang terjadi antara kota dan desa yang timpang, bukan saja ditandai dengan adanya penetrasi modal dari kota ke desa, tetapi juga diikuti dengan terjadinya proses involusi yang melampaui titik jenuh. Kesempatan kerja di desa turun drastis, dan akibatnya kemudian banyak penduduk desa yang terpaksa melakukan migrasi ke kota besar atau bahkan ke negeri jiran untuk mencari pekerjaan Untuk menangani persoalan kemiskinan, pengangguran, dan segera baru. menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi tenaga kerja yang ada di Provinsi Jawa Timur, saat ini yang dibutuhkan tak pelak adalah agenda program yang jelas dan fokus penanganan yang benar-benar efektif. Untuk kepentingan inilah, karena itu

dibutuhkan sebuah studi yang komprehentif mengenai persoalan dan upaya penanganan para pengangguran yang ada di Jawa Timur. Studi ini mendesak dilakukan, karena perkembangan angka pengangguran yang makin tidak terkendali, jelas akan menjadi semacam bom waktu yang dapat membuat kegiatan pembangunan di Jawa Timur makin terpuruk (Sudarso, 2012).

Jika kita perhatikan masalah yang mempengaruhi tingkat kemiskinan bukan karena adanya pengangguran saja tetapi juga bisa di lihat dari sisi banyaknya jumlah penduduk atau bisa dikatakan kuantitas tidak mengimbangi kualitas. Menurut Sukirno (1997, 68), perkembangan jumlah penduduk bisa menjadi faktor pendorong dan penghambat pengangguran. Faktor pendorong diakibatkan karena memungkinkan banyaknya tenaga kerja, lalu bisa juga disebabkan oleh perluasan pasar, karena perluasan pasar itu diakibatkan dua faktor penting yaitu jumlah pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Sedangkan penduduk disebut faktor penghambat pembangunan karena akan menurunkan produktivitas, dan akan terdapat banyak pengangguran. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, jumlah penduduk yang besar justru akan memperparah tingkat kemiskinan. Fakta menunjukan, dikebanyakan negara dengan jumlah penduduk yang besar tingkat kemiskinannya juga lebih besar jika dibandingkan dengan negara dengan jumlah penduduk sedikit. Banyak teori dan pendapat para ahli yang meyakini adanya hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan kemiskinan, salah satunya adalah Thomas Robert Malthus. Malthus meyakini jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan maka suatu saat nanti sumber daya alam akan habis, sehingga muncul wabah penyakit, kelaparan dan berbagai macam penderitaan manusia.

Pertumbuhan ekonomi yang merupakan indikator tujuannya melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi disektor – sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor yang padat kerja. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modem sperti jasa yang padat modal (Siregar, 2008)

Pembangunan ekonomi yang semenjak masa sentralistik terpusat di pulau jawa tidak menutup kemungkinan Jawa terkena masalah kemiskinan. Menurut Siregar dan Wahyuniarti (2008:67) Jumlah penduduk miskin di Indonesia terpusat di Pulau Jawa, terutama provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Konsentrasi penduduk miskin di Pulau Jawa mencapai rata – rata 57,5 persen dari total penduduk miskin di Indonesia. Hal itu menunjukan pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh golongan masyarakat tertentu, tidak merata bagi seluruh golongan masyarakat.

Terlihat pada tabel 1.1, di dalamnya terdapat data – data yang meneliti perkembangan penduduk miskin. Penduduk miskin di Pulau Jawa lebih sering meningkat dari pada menurun, sudah jelas bahwa pertumbuhan ekonomi di negara kita hanya sering dinikmati oleh golongan golongan tertentu, bahkan rakyat miskin hanya terus ditindas, kadang kalanya ada bantuan untuk rakyat miskin itu saja juga harus di persulit. Pulau Jawa adalah pusat dari segala kegiatan ekonomi negara di Indonesia, jika di Pulau Jawa saja banyak kemiskinan apa yang terjadi di Pulau – pulau atau Provinsi – Provinsi lainnya. Banyak masyarakat Indonesia yang jatuh miskin. dan belum dapat di tanggulangi secara penuh.

Table 1

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Jawa

Tahun 2004-2011 (ribu jiwa)

Tahun	DKI	Jawa	Jawa	Yogyakarta	Jawa	Banten
	Jakarta	Barat	Tengah		Timur	
2004	277,1	4.654,2	6.843,8	313,2	7.312,5	779,2
2005	316,2	5.137,6	6.533,5	625,8	7.139,9	830,5
2006	407,1	5.712,5	7.100,6	648,7	7.678,1	904,3
2007	405,7	5.457,9	6.557,2	633,5	7.155,3	886,2
2008	379,6	5.322,4	6.189,6	616,3	6.651,3	816,7
2009	323,2	4.983,6	5.725,7	585,8	6.022,6	788,1
2010	312,2	4.773,7	5369,2	577,3	5.529,3	758,2
2011	363,4	4.648,6	5.107,3	560,9	5.356,2	690,4

Sumber: Badan Pusat Statistik

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah :

- 1. Apakah jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan masyarakat dapat mempengaruhi secara simultan maupun secara persial terhadap kemiskinan yang berada di Provinsi Jawa Timur pada periode 2004 2011 ?
- 2. Faktor manakah yang paling dominan atau berpengaruh terhadap kemiskinan khususnya di Provinsi Jawa Timur pada periode 2004 2011 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui pengaruh Simultan maupun persial faktor jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan masyarakat terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
- 2 Untuk mengetahui faktor manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini diharapkan berguna untuk:

- Bagi mahasiswa akan berguna sebagai penambah wawasan pengetahuan tentang kemiskinan.
- 2. Sebagai teori pendukung untuk penelitian selanjutnya.